

Ambiguitas Agama sebagai Peluang dalam Menciptakan Perdamaian Agama

Ihsan Ali-Fauzi

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina, Jakarta

ihsanaf@paramadina-pusat.or.id

Abstract

Popular news on religious issues tends to simplify the values of religion in socio-political expressions. They attend to blow acts of violence up in the name of religion. In this context, media remark some religious groups by using horrible terms and idioms, such as zealots, extremists, militants, etc. Moreover, they swipe it with taking some appalling photos and pictures. Religious leaders perceive this phenomenon as kind of misunderstanding paradigm in approaching and viewing religion, having known that conflict and violence are not only socio-political expression of religion. There are many untold beautiful expressions of religion, like Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mother Theresa, Malcolm X, and Dalai Lama. This article attempts to explore how religion can deeply be embodied with peace building, conflict management, and peace studies. It suggests that in order to be a tool of peace building, religion should not be used for proselytizing other people but rather should be put in academic and rational way to spread voices of peace. In addition to this, peace message of religion should also be expressed especially in social media as a counteraction against violent message of religious extremists. And the last thing is that peace building can only be achieved when peace work can bridge religious and secular communities.

Keywords: Humanism, Peace, Religious Studies.

Pendahuluan

Para “agamawan humanis”, untuk mudahnya sebutlah begitu sementara ini, sering kali dongkol dengan kebiasaan industri informasi dan komunikasi massa (umumnya media massa populer, tetapi kadang juga buku-buku instan, yang ditulis terburu-buru untuk momentum tertentu dan isinya biasanya dangkal) mengungkap hal-hal yang melulu buruk mengenai ekspresi sosial-politik agama. Yang biasanya diungkap adalah konflik dan aksi-aksi kekerasan, sering kali dengan akibat amat memilukan, yang dilakukan atas nama agama. Ingatlah bagaimana media memberitakan orang-orang Yahudi di Israel yang membunuh kaum Muslim yang tengah salat di Masjid Hebron, orang-orang Hindu di India yang membakar Masjid Babri, orang-orang Islam di Mesir yang meneror dan membunuh para turis atau di Bangladesh dan Iran yang menuntut hukuman mati terhadap novelis Taslima Nasreen atau Salman Rushdie, akar-akar (etnis-) agama konflik berkepanjangan di Irlandia Utara dan bekas Yugoslavia, dan seterusnya.

Dalam model pemberitaan seperti ini, orang-orang dengan motivasi keagamaan itu disebut dengan kata-kata seram: *zealots*, *extremists*, *militants*, dan yang sejenisnya. Kadang, liputan itu dilengkapi dengan ilustrasi foto yang mengerikan, membangunkan bulu kuduk. Model pemberitaan yang sebaliknya, berisi kisah yang enak didengar, misalnya, tentang upaya-upaya perdamaian oleh kalangan agamawan, amat jarang ditemukan.¹

¹ Di antara yang jarang itu, saya pernah membacanya suatu kali di *Newsweek*, 9 November 1997, yang saya laporkan kembali dalam “Para Pendamba Perdamaian,” dalam *Ummat*, 17 November 1997. Ada dua cerita dalam tulisan itu. Yang pertama mengisahkan upaya dua bapak (Yehuda Wachsman, seorang Yahudi, dan Syekh Yasin Hamed Badr, seorang Muslim Palestina) yang masing-masing anaknya (satu tentara Israel dan satunya lagi aktivis organisasi Islam radikal HAMAS) mati karena perang, mendirikan sebuah pusat untuk menggalakkan toleransi beragama di Yerusalem. Pertemuan keduanya pertama kali difasilitasi oleh seorang wartawan Palestina yang bekerja untuk sebuah surat kabar Israel. Cerita yang kedua mengisahkan dua pemuka agama (Syekh Rajai Abdo dan Rabi Jeremy Milgrom) yang berceramah keliling dunia mengenai proses perdamaian. Pada butir apa saja keduanya bersepakat? “Keesaan Yang Mahakuasa,” kata Abdo. Ditambahkannya, “Saya telah merasakan sisi sangat humanistik dari warga Yahudi. Warga Yahudi dan Muslim telah mengalami tragedi yang

Para agamawan di atas itu punya sejumlah alasan untuk merasa dikecewakan. Pertama-tama, konflik dan kekerasan hanya salah satu wajah sosial-politik agama. Kekerasan agama tidak selalu merupakan wajah agama yang terpenting. Ada sekian banyak wajah agama yang teduh yang bisa diungkap media kepada dunia. Maka, model pemberitaan di atas, sekalipun jika benar didasarkan atas peristiwa yang benar terjadi, dipandang tidak adil terhadap agama. Adalah tidak adil karena model pemberitaan seperti itu telah mereduksi agama sekedar sebagai alat untuk saling membantai. Apalagi jika diingat bahwa tradisi agama-agama, selain memiliki ajaran (yang memang bisa, dan sering, diselewengkan dan disalahgunakan) yang menyerukan perdamaian (perlu diingat, sebagian pemuka agama bahkan mengklaim bahwa inilah inti ajaran agama), juga memiliki sederet tokoh yang telah terbukti mau dan berani berkorban, bahkan dengan jiwa mereka, untuk memperjuangkan ajaran itu. Dalam sejarah agama-agama abad ke-20 saja, misalnya, kita bisa menyebut nama Mahatma Gandhi (Hindu), Martin Luther King Jr. (Kristen), Malcolm X (Islam), Ibu Theresa (Katolik), dan Dalai Lama (Budha). Agar adil, pemberitaan mengenai kekerasan berjubah agama, yang sebenarnya bertentangan dengan semangat ajaran agama itu sendiri, seharusnya mengungkap pula akar-akar kultural dan struktural terjadinya kekerasan itu, oleh para aktor agama di sebuah lingkungan sosial, ekonomi dan politik tertentu. Tetapi persis alasan inilah yang sering kali absen dari model pemberitaan di atas.²

sejenis, dan telah merasakan pengalaman diaspora yang sama.” Menurut pengakuan mereka, mereka dianggap naif oleh sebagian besar rekan mereka, baik warga Israel maupun Palestina.

² Butir ini, mengenai kecenderungan media untuk meliput melulu kekerasan atas nama agama, dengan model penyajian yang dangkal dan tidak lengkap, terang memerlukan pembahasan sendiri yang bukan di sini tempatnya. Tetapi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal ini terkait dengan semacam rumus yang amat dipegang di dunia industri komunikasi, bahwa berita yang layak dijual adalah berita-berita mengenai korban dan kenestapaan. Rumus itu dikenal dengan “bad news is good news”. Sebagian orang mengatakan, ini ada kaitannya dengan bawaan intrinsik manusia kepada kekerasan. Akan halnya soal kedangkalan berita, hal ini terkait dengan keinginan media, didorong tingkat kompetisi yang makin tinggi, untuk menyajikan berita secepat mungkin, bukan sedalam atau selengkap mungkin. Istilahnya, *hard news* atau *breaking*

Alasan lain kekecewaan para agamawan di atas terkait dengan semacam strategi kampanye penyebaran nilai-nilai anti-kekerasan itu sendiri. Model peliputan itu dianggap tidak berorientasi kepada penyelesaian konflik dan pengupayaan perdamaian, atau setidaknya tidaknya lebih merugikan daripada menguntungkannya. Model itu kemungkinan besar hanya akan memancing munculnya kekerasan tandingannya, sekarang atau nanti, langsung atau tidak. Pemberitaan yang melulu kekerasan dianggap dapat menjadi unsur yang ikut merakit terbentuknya budaya dan lingkaran kekerasan. Banyak sekali contoh yang memperlihatkan bagaimana seorang atau sekelompok agamawan yang semula berpandangan pluralis,³ sedikitnya inklusif, beralih menjadi sebaliknya, berpandangan eksklusif dan bersikap ekstrem, karena deraan informasi yang dangkal dan tidak lengkap mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap rekan-rekannya seiman oleh kelompok agama lain.⁴

news, pokoknya berita saja. Sebagian orang mengatakan hal ini terkait dengan hasrat manusia modern yang makin meningkat akan informasi yang instan.

³ Dalam soal keragaman agama, biasanya dikenal tiga orientasi besar. “Eksklusivisme” adalah orientasi yang ingin membangun kantong yang tertutup (*enclave builder*), yang menegaskan bahwa hanya ada satu cara untuk memahami realitas dan menafsirkan yang suci. “Inklusivisme”, sebaliknya, menegaskan bahwa meskipun ada berbagai tradisi keagamaan, komunitas keagamaan, dan kebenaran, suatu tradisi agama tertentu adalah puncak dari tradisi-tradisi lainnya, lebih unggul dari yang lain itu, atau cukup lengkap untuk juga menampung yang lain itu dalam posisi lebih rendah. Akhirnya, “pluralisme” adalah orientasi yang menegaskan bahwa kebenaran bukanlah milik eksklusif sebuah tradisi atau komunitas keagamaan tertentu. Dalam wawasan terakhir, keragaman komunitas dan tradisi dipandang bukan sebagai hambatan untuk mengatasi, melainkan sebagai peluang untuk pergumulan yang bersemangat dan dialog dengan yang lain. Dalam wawasan seorang pluralis, seperti ditulis Diana Eck, “Tuhan adalah cara kita berbicara mengenai sebuah Realitas yang tak dapat dicakup seluruhnya oleh sebuah tradisi keagamaan mana pun, termasuk tradisi keagamaan kita sendiri”. Lihat Scott Appelby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation* (Boston: Rowan and Littlefield, 1999), 13-14.

⁴ Saya berjumpa dengan banyak orang, dari kalangan Islam di Indonesia, yang mengalami perubahan sikap seperti ini menyusul berlarut-larutnya kasus pertikaian antara kalangan Islam dan Kristen di Ambon dan Maluku Utara sekitar sepuluh tahun lalu. Mereka sebenarnya menyadari akar-akar non-agama pertikaian itu. Tetapi ketika kasus itu tidak juga tuntas, dan tidak ada tanda-tanda penuntasannya, sementara mereka didera dengan informasi mengenai korban yang terus berjatuhan, maka yang kemudian tumbuh dalam dada mereka adalah *in-group feeling* terhadap saudara-saudara seiman. Dalam penilaian mereka, lepas dari asal-usul sejatinya yang non-agama, yang mereka

Dalam kasus seperti ini, berlakulah rumus “*fundamentalisms breed another fundamentalisms*”, fundamentalisme hanya akan melahirkan fundamentalisme lainnya.

Agamawan-Humanis versus Fundamentalis

Ketika menyebut istilah “agamawan-humanis” di atas, saya teringat kepada orang-orang seperti Abdullahi Ahmed An-Na’im asal Sudan, yang harus mengasingkan diri ke luar negeri karena komitmennya kepada penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilecehkan regim di negerinya. Atau, orang seperti Sulak Sivaraksa, seorang tokoh Budha di Thailand, yang terus melawan arus dan tetap mengabarkan bahwa kekerasan, apa pun alasannya, hanya akan mengkhianati dan mencederai ajaran Budha. Atau, trio pendeta Budha (Maha Ghosana), aktivis HAM Yahudi (Liz Bernstein), dan pendeta Jesuit (Bob Maat), yang tanpa kenal lelah dan menempuh segala risiko memimpin sejumlah kelompok umat Budha di Kamboja dalam aksi-aksi tanpa-kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Orang-orang seperti yang saya sebutkan di atas, seraya tetap teguh percaya akan kebenaran yang termuat dalam agama mereka, tidak menutup peluang bagi berlangsungnya dialog dan pertukaran budaya dengan orang atau orang-orang dengan latar belakang mana pun, baik yang religius maupun yang sekuler. Mereka bukan saja menyepakati pluralisme (yang lebih “berisiko” dari sekadar inklusivisme, apalagi eksklusivisme), tetapi juga menyatakan komitmen mereka untuk menegakkannya. Orang-orang seperti itu tidak pernah mengkhianati kebenaran agamanya, namun keteguhannya kepada agamanya tidak membuatnya untuk tidak bergandengan dengan yang lain. Bahkan, di antara mereka menyatu dalam perjuangan bersama untuk menciptakan perdamaian. Apa yang mereka tempuh bukan tanpa risiko. Cemoohan dan bahkan ancaman pertama kali datang bukan dari kelompok lain, tapi sering kali dari saudara-saudara seimannya sendiri.

lihat belakangan ini pada akhirnya adalah sebuah aksi saling tumpas dan saling bunuh oleh orang-orang yang berbeda karena baju agamanya.

Saya menyebut mereka “humanis”, karena mereka percaya bahwa agama, sekalipun didesain oleh dan bersumber dari Yang Mahasuci di atas manusia dan di atas makhluk lain mana pun di alam semesta ini, diturunkan untuk—dan hanya untuk—manusia, semua manusia, bukan untuk Tuhan itu sendiri atau sekelompok kecil umat manusia yang terpilih sebagai nabi atau utusan-Nya. Didorong oleh religiositas yang menggumpal dalam jiwa, mereka melihat citra dan bayangan Yang Mahasuci dalam diri manusia, juga dalam tindak penciptaan manusia, kehidupan, dan alam semesta. Dan untuk semua itu, mereka tidak bisa berbuat lain kecuali mengusahakan tetap terpeliharanya kesucian semua itu, kesucian penciptaan dan martabat kehidupan, dengan manusia sebagai porosnya. Bagi mereka, menjadi religius adalah menjadi saksi mengenai kesucian dan ketinggian harkat penciptaan ini. Dalam posisi ini, konflik dan kekerasan atas nama agama, yang mengharuskan jatuhnya korban manusia di atas altar perjuangan demi Yang Mahasuci, bukan saja absurd, melainkan juga *scandalous*.

Dihadapkan kepada model pemberitaan yang melulu menembak sisi kekerasan dari ekspresi sosial-politik agama seperti disebutkan di atas, para agamawan-humanis itu kini seakan sedang berperang melawan dua *front* yang sama beratnya, militansinya, dan ekstremnya yang satu sama lain saling menyalahkan, bahkan saling menyetankan.⁵ Yang pertama adalah kaum 'fundamentalis agama' yang merasa bahwa sesuatu yang bernama kebenaran sudah ada di tangan mereka (dan hanya di tangan mereka), yang bulat tanpa benjol sedikit pun karena sumbernya Tuhan yang sepenuhnya benar, dan tugas mereka adalah memperjuangkannya, termasuk dengan kekerasan kalau perlu. Mereka merasa apa yang mereka ucapkan dan lakukan sepenuhnya adalah ucapan dan tindakan Tuhan itu sendiri. Tidak ada satu pun kemungkinan kesalahan yang mereka lakukan karena mereka adalah penjelmaan Tuhan, dan adalah tidak mungkin bahwa Tuhan itu salah.

⁵ Saya meminjam istilah ini dari John L. Esposito, “*mutual satanization*”. Lihat bukunya, *Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 1992). Untuk analisis yang senada, lihat antara lain Richard Falk, *Explorations at the Edge of Time: The Prospects for World Order* (Philadelphia: Temple University Press, 1992), 24-25.

Orang-orang yang tergabung dalam *front* ini (mereka ada di semua agama tanpa pandang bulu) dengan sendirinya militan dan ekstremis. Mereka memandang bahwa mereka adalah kelompok pilihan yang diberi keistimewaan untuk membawa misi suci ketuhanan. Kematian dalam memperjuangkan kebenarannya adalah sebuah kematian suci, mati syahid.

Sedang *front* yang kedua adalah kaum 'fundamentalis sekuler', yang merasa bahwa agama sudah tidak punya hak hidup sekarang ini. Bagi kelompok ini, semua persoalan harus diputuskan hanya oleh akal manusia. Intervensi agama dalam urusan dunia hanya mendatangkan pertumpahan darah, seperti banyak dicatat dalam sejarah. Kelompok ini juga memandang bahwa perpaduan agama dan politik itu tidak normal dan berbahaya.

Kelompok kedua ini mengingatkan kita kepada pemimpin tertentu Revolusi Perancis yang menjadikan sekularisasi total sebagai salah satu program utamanya, yang merasa bahwa gereja adalah lawan yang sedikit pun tidak punya kebajikan dan harus diluluhlantakkan sehabis-habisnya, di abad ke-18. Revolusi Prancis adalah sebuah revolusi yang tidak hanya menghancurkan istana, tapi juga merobohkan gereja. Tatanan politik yang demokratis diyakini hanya bisa ditegakkan apabila agama sudah berhasil dimusnahkan.

Kecuali para petualang politik dan ekonomi (mereka bisa sekuler dan bisa juga agamawan) tertentu, atau orang-orang tertentu yang naik-turunnya karier mereka sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya semacam krisis kemanusiaan yang besar (misalnya para pemegang kebijakan di sebuah negara besar, para diplomat atau wartawan), yang memperoleh banyak manfaat dengan berlangsungnya konflik dan aksi-aksi kekerasan berbaju agama, tidak ada seorang pun yang diuntungkan oleh situasi di atas. Mereka yang berada di kedua *front* fundamentalis pun tidak diuntungkan oleh situasi itu, kecuali jika mereka memang berpandangan bahwa kehidupan dunia yang normal adalah sebuah kehidupan yang ditandai oleh berlangsungnya konflik dan aksi-aksi kekerasan yang terus-menerus.

Hal ini tidak boleh dianggap mengada-ada atau disepelekan karena beberapa ahli, misalnya yang terkenal adalah Konrad Lorenz, menyatakan bahwa kekerasan adalah bawaan dasar manusia yang harus disalurkan.⁶ Dan, bukankah asumsi ini yang menjadi dasar kuatnya paham realisme dalam hubungan internasional? Pandangan seperti ini seakan hendak mengakui bahwa manusia tidak lain hanya binatang yang insting dasarnya hanya untuk berperang. Pandangan seperti ini tidak hanya sangat reduktif dalam memandang manusia, tapi juga sangat membahayakan. Kekerasan menjadi absah karena memang pada dasarnya manusia sejak dari sana adalah binatang buas. Jika ada manusia yang menciptakan perdamaian, mereka dipandang sebagai abnormal oleh pandangan seperti ini.

Potensi Agama sebagai Sumber Konflik

Jika begitu persoalannya, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah bagaimana perilaku saling menyetankan itu bisa diakhiri, sedikitnya diminimalisasi terus-menerus? Bagaimana upaya-upaya ke arah perdamaian bisa ditopang dan digalakkan? Bagaimana maksud baik para agamawan-humanis di atas itu, untuk membangun jembatan dialog dan pertukaran budaya di antara umat manusia, dapat disistematisasi dan diagendakan, dibangun strategi, keterampilan dan teknik-tekniknya?

Yang pertama-tama perlu segera disadari, menurut hemat saya, adalah bahwa hubungan antara agama dan kekerasan adalah sebuah hubungan yang ditandai oleh ambiguitas, sifat mendua, yang sangat nyata. Kalangan agamawan tertentu boleh saja mengklaim bahwa orientasi kepada perdamaian sudah intrinsik ada dalam tradisi agama-agama.⁷ Namun, di sisi lain, juga dapat dibenarkan jika dikatakan bahwa

⁶ Lihat karyanya yang terkenal, *On Aggression*, terj. Marjorie Kerr Wilson (New York: Harcourt Brace Javanovich, 1966).

⁷ Klaim ini biasanya diikuti dengan upaya para agamawan untuk membedakan antara agama yang “benar” (atau autentik), yang dipandang hanya menyerukan perdamaian, dan agama yang “palsu”, yang dianggap lebih “militan”, “ekstremis” dan “fundamentalistis”. Pandangan ini mengecam para pemimpin politik yang membawa-bawa agama untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi sendiri. Agama,

agama secara intrinsik juga dapat memancing terjadinya konflik dan kekerasan. Aga ibarat sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa menjadi alat menciptakan perdamaian karena agama selalu menyeru manusia untuk mencapai derajat kemanusiaan tertinggi melalui nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Di sisi lain, *truth claim* yang mengeram di hampir semua agama juga bisa membawa pemeluknya untuk memandang *sang liyan* sebagai para pendosa yang harus dipertobatkan, bahkan dalam beberapa hal, ditaklukkan.

Mengenai butir terakhir di atas, tidak terlalu sulit bagi kita untuk memperoleh penjelasannya. Khazanah sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, tentunya juga sejarah, memberi kita banyak tilikan untuk soal ini.⁸ Pertama-tama, hal ini terkait dengan kenyataan bahwa agama diakui dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan eksistensial manusia mengenai apa dan siapa dirinya di tengah alam semesta yang kadang membingungkan ini. Dari sini agama berkembang menjadi sumber penemuan identitas diri (dan kemudian kelompok). Dalam posisi yang demikian, agama menyatukan orang-orang tertentu ke dalam kelompok-kelompok tertentu, dan karena itu juga membedakan orang dari satu ke lain kelompok. Perbedaan ini menciptakan dinamika psikologis antara kelompok “kita” dan “mereka”. Identitas kelompok ini cenderung menguat dan mengeras terutama di tengah situasi konflik.

Kedua, identifikasi “kita” dan “mereka,” membutuhkan legitimasi terus-menerus agar tidak usang. Untuk kebutuhan ini, dikembangkanlah narasi besar berupa dasar-dasar keimanan, kisah-kisah dan ritual keagamaan, keterlibatan dalam upacara-upacara keagamaan tertentu, dan seterusnya. Narasi ini sering kali diperkukuh oleh bentuk-bentuk ekspresi keagamaan yang amat kasat mata seperti kekhasan pakaian, arsitektur, musik, dan lainnya. Semua ini menambah kekukuhan

menurut sudut pandang ini, harus dibebaskan dari konsekuensi-konsekuensi tragis yang muncul dari “niat buruk” para pemimpin politik.

⁸ Paparan di bagian ini terutama saya dasarkan pada John Kelsay and Summer B. Twist (eds.), *Religion and Human Rights* (New York: The Project of Religion and Human Rights, 1994), 4-9. Lihat juga misalnya William R. Garrett, “Religion and the Legitimation of Violence”, dalam Jeffrey K. Hadden and Anson Shupe (eds.), *Prophetic Religions and Politics* (New York: Paragon House, 1986), 103-122; John Kelsay, *Islam and War: A Study in Comparative Ethics* (Louisville, Kentucky: Westminster, 1993), 115-117.

identitas diri dan kelompok serta memperteguh pembedaan di antara banyak orang dan kelompok.

Tidak ada sesuatu pun yang salah dalam membangun identitas diri dan kelompok, termasuk menjaganya. Akan tetapi, solidaritas *in group* ini juga bisa mengarah kepada sikap chauvinistik yang berbahaya dalam berhadapan dengan kelompok lain. Dalam situasi yang amat genting, narasi seperti ini akan berkembang makin tajam, mengarah kepada eskalasi konflik. Kelompok sendiri, “kita”, disucikan dan makin disucikan, sedang kelompok lain, “mereka”, dilecehkan dan disetankan.

Lalu, dalam situasi genting, kedua hal di atas--fungsi agama sebagai pemberi identitas dan kelompok, dan narasi yang menopangnya--dapat berkembang lebih jauh ke dalam apa yang mencirikan pola utama kekerasan keagamaan selama ini, yaitu pemberian legitimasi kepada penggunaan kekerasan (bersenjata) dalam jihad besar, “perjuangan suci”, melawan kelompok-kelompok lain, kelompok “mereka”.

Pemberian legitimasi ini dapat berlangsung dalam berbagai cara. *Pertama*, seruan formal kepada tradisi keagamaan tertentu, yang menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan kekerasan (bersenjata) dapat dibenarkan. *Kedua*, penguatan narasi-narasi yang menunjukkan kejahatan dan kebengisan kelompok lain, kelompok “mereka”, yang mengancam keselamatan kelompok “kita”. *Ketiga*, rujukan kepada sebuah misi suci keagamaan tertentu di mana tindakan militeristik, setidaknya dalam situasi tertentu, dapat dibenarkan.⁹

Kemudian, bagaimanakah sebuah aksi kekerasan (bersenjata) pada akhirnya dapat dibenarkan oleh agama? Inilah sebab berikutnya mengapa agama secara intrinsik potensial untuk melahirkan konflik dan kekerasan. Komunitas agama tertentu, kelompok “kita”, pada akhirnya memerlukan sebuah ruang dan wilayah di mana “kita” bisa unggul dan mendominasi. Komunitas agama seperti sebuah kelompok sosial yang melihat yang lain sebagai pesaing. Jumlah anggota dan penguasaan atas

⁹ Untuk penjelasan lebih lanjut dan ilustrasi yang amat kaya mengenai butir kedua dan ketiga ini, lihat misalnya dua rujukan berikut: Rene Girard, *Violence and the Sacred*, terj. Patric Gregory (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1977); David I. Kertzer, *Ritual, Politics and Power* (New Haven and London: Yale University Press, 1998).

berbagai sumber daya serta dominasi adalah hal-hal yang turut bermain di dalamnya. Agama tidak semata-mata berbicara tentang keluhuran budi dan kedalaman spiritual, tapi juga bagaimana ia bisa mengungguli dan mengalahkan yang lain.

Kalau kita lihat sejarah sekilas saja, akan tampak jelas bahwa ambiguitas di atas adalah fakta-fakta keras, sebuah *hard fact*, yang sulit ditolak. Karenanya, hal itu mestinya tidak terlalu mengagetkan siapa pun atau mengecewakan siapa pun. Kenyataan itu juga tidak perlu membuat galau dan malu para agamawan yang mendambakan dunia yang damai, hanya karena selalu ada jarak antara apa yang diajarkan agama dan apa yang dilakukan oleh para pemeluknya, antara keinginan dan kenyataan, antara cita-cita luhur dan fakta yang sebaliknya. Sementara, benar bahwa agama, bahkan inti ajarannya, menyerukan perdamaian, juga benar dikatakan bahwa, semua agama, baik dalam sejarah maupun dalam konteks kontemporer, merupakan salah satu dari beberapa sumber konflik kekerasan yang paling pokok.

Inilah sisi ambiguitas agama yang harus disadari. Mengabaikannya hanya akan menutup berbagai terobosan kreatif dalam membangun perdamaian berdasarkan agama. Mengakui kenyataan ambiguitas agama akan menjadikan upaya-upaya perdamaian tetap berpijak pada realitas yang sesungguhnya.

Militansi Agama: Dari Konflik Menuju Perdamaian

Pengakuan mengenai fakta keras agama itu sendiri sebenarnya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan setelah kita menyadari dan mengakuinya. Dalam hal ini, ambiguitas di atas harus dijadikan sebagai kesempatan, sebagai peluang baru, justru untuk menunjukkan dan mewujudkan potensi intrinsik agama sebagai sumber daya perdamaian. Para agamawan yang punya komitmen kepada perdamaian tidak hanya boleh berkeluh-kesah. Tidak cukup bagi mereka untuk hanya dengan mengatakan agama dapat berperan seperti itu, melainkan juga menyatakan komitmen mereka dalam aksi-aksi konkret ke arah itu. Jika kekerasan atas nama agama

memerlukan militansi, maka upaya perdamaian oleh agama juga mensyaratkan sebuah militansi.¹⁰

Untuk sampai ke sana, sisi kedua dari agama di atas, yaitu sisinya sebagai salah satu sumber konflik, pertama-tama harus diurai dan diperhatikan sungguh-sungguh. Ekspresi kekerasan atas nama agama harus ditinjau secara teliti, dilihat kasus demi kasus, dalam konteksnya yang luas. Ini bukan untuk menekankan terutama sisi buruk agama, tapi untuk memperoleh potretnya yang benar, selengkap-lengkapnyanya, sebagai dasar bagi perumusan agenda dan strategi kerja ke arah upaya-upaya perdamaian di masa depan. Dalam hal ini, kabar buruk yang benar harus dipandang sebagai lebih baik ketimbang kabar baik yang palsu, yang bohong.

Tentu saja, semangatnya di sini bukan seperti kepentingan media sebagaimana yang dikritik di awal tulisan ini. Jika media melakukan pekerjaannya di atas slogan “*bad news is good news*”, maka yang menjadi perhatian di sini adalah memulai kerja-kerja perdamaian dengan melihat berbagai potensi agama secara menyeluruh, termasuk potensinya dalam menciptakan konflik.

Jika anjang-ancangnya benar demikian, maka kita memiliki tiga gugus pertanyaan besar yang harus dijawab di sini. *Pertama*, dalam kondisi apa saja para aktor agama yang militan melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama agama? *Kedua*, sebaliknya, dalam kondisi apa pula para aktor agama menolak aksi-aksi kekerasan dan menentang komitmen aktor agama yang ekstremis atau militan untuk menggunakan kekerasan sebagai sebuah tugas suci atau sebuah privilese keagamaan? Dan *ketiga*, dalam kondisi apa pula para aktor agama yang memiliki komitmen kepada perdamaian dan aksi-aksi tanpa kekerasan dapat mengembangkan diri menjadi para agen pembangun perdamaian (*peace builder*)?

Dalam studinya yang terkenal, Scott Appleby mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas itu.¹¹ Menurutnya, kekerasan keagamaan

¹⁰ Untuk beberapa contoh keterlibatan agamawan yang lebih mutakhir, lihat David Little (ed.), *Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution* (New York: Cambridge University Press, 2007), 25.

¹¹ Appleby, *the Ambivalence of the Sacred*, 282.

terjadi ketika para pemimpin ekstremis agama tertentu, dalam reaksi mereka terhadap apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat, berhasil memanfaatkan argumen-argumen keagamaan (atau etnis-keagamaan) untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain. Ini seperti sebuah kerja pembingkai (*framing*). Kompleksitas ketidakadilan realitas sosial, politik, budaya, ekonomi, yang hendak dilawan, berhasil disederhanakan menjadi sebuah rumusan yang gampang untuk dicerna dan dipahami oleh khalayak. Argumen-argumen keagamaan adalah salah satu cara yang biasanya digunakan untuk membingkai ketidakadilan dalam rumusan-rumusan sederhana yang memiliki efek menggerakkan.

Militansi kekerasan yang digerakkan oleh argumen-argumen keagamaan hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan yang sebanding. Penolakan keagamaan terhadap berbagai kekuatan ekstremisme dimungkinkan jika para pemimpin agama berhasil menumbuhkan militansi anti-kekerasan (*non-violent militancy*), baik sebagai norma agama maupun sebagai strategi untuk menentang dan mengatasi ketidakadilan dalam sebuah lingkungan struktural suatu masyarakat.

Upaya-upaya perdamaian oleh kelompok agamawan-humanis hanya bisa dilakukan jika mereka bisa menghadirkan argumen-argumen keagamaan yang juga kokoh dan *legitimate* dalam mendukung upaya-upaya perdamaian. Cara-cara ini harus dipastikan memiliki efek yang sebanding, yaitu mampu menciptakan militansi perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Skema ini sebetulnya mirip dengan *counter hegemony*, di mana sebuah kesadaran tertentu yang dibangun melalui pengakuan atas ideologi suatu kelompok (kaum ekstremis) dilawan dengan membangun kesadaran baru yang sebaliknya.

Perdamaian agama terjadi ketika para pemeluk agama memiliki sikap militan dan mau mendedikasikan diri mereka kepada sikap dan aksi-aksi tanpa kekerasan. Di samping itu, mereka memiliki kemampuan teknis dan profesional dalam mencegah, memberi sinyal awal, memperantarai dan melakukan unsur-unsur lain ke arah transformasi konflik dan kekerasan.

Agama Perdamaian sebagai Narasi Tandingan

Dalam menciptakan perdamaian berbasis agama, setidaknya, ada dua unsur kunci dalam paparan Appleby yang cermat di atas. Yang pertama adalah militansi dan yang kedua adalah persepsi mengenai ketidakadilan yang menjadi dasar pijak para aktor agama untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Dua unsur ini penting dalam upaya membangun perdamaian agama.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, jika kekerasan atas nama agama memerlukan militansi, maka upaya-upaya perdamaian oleh agama juga mensyaratkan sebuah militansi. Adalah tidak mungkin melawan sebuah kekuatan yang digerakkan dengan semangat militansi yang sangat kuat dengan gerakan-gerakan yang tidak cukup memiliki tenaga untuk berjuang.

Dengan kata lain, upaya-upaya perdamaian ini harus ditegaskan dan gencar dilakukan, dengan organisasi yang rapi dan agenda yang jelas, dengan ketrampilan dan teknik-teknik yang memungkinkan pencapaiannya. Hal ini penting dan harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa sentimen dan komitmen keagamaan bukanlah hak prerogatif mereka yang eksklusif dalam wawasan keagamaannya, yang biasanya mudah menggunakan aksi-aksi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Mereka yang berpandangan eksklusif itu punya hak untuk menafsirkan dan mengekspresikan agama menurut cara pandang mereka, tetapi hal itu bukanlah satu-satunya penafsiran dan ekspresi agama yang sah. Kelompok pluralis, atau inklusif, juga memiliki hak yang sama dalam menafsirkan pesan-pesan Tuhan. Kebenaran agama yang disuarakan oleh kelompok eksklusif harus ditandingi untuk menyatakan kepada telinga umum bahwa itu hanya sebuah tafsir. Layaknya sebuah tafsir, ia hanya bernilai nisbi. Karena itu, maka hak yang sama juga berlaku bagi kelompok agamawan-humanis.

Di atas sudah disebutkan bahwa aksi-aksi kekerasan atas nama agama turut dibangun oleh narasi-narasi yang memperkokoh identitas “kita”, seraya menyetankan “mereka”. Agar kampanye perdamaian atas nama agama dapat berjalan baik, para agamawan yang anti-kekerasan harus membangun narasi-narasi tandingan yang dapat menopang

perdamaian. Narasi-narasi beraura konflik dan permusuhan harus ditandingi dengan narasi-narasi yang mendorong tumbuhnya rasa saling menghormati di antara sesama manusia dan cita-cita pluralisme.

Dasar argumentasi yang sama juga harus disampaikan secara terang-benderang kepada kaum “fundamentalis sekuler” yang sering mencibir dan melecehkan kemampuan agama sebagai sumber daya perdamaian. Cita-cita luhur Pencerahan, yang sering dibanggakan kaum sekuler, pada praktiknya juga sama tidak mulusnya dengan cita-cita yang diinspirasi oleh sumber lain. Abad ke-20 yang baru lalu mencatat bahwa sekalipun membawa kemakmuran ekonomi dan banyak kemudahan hidup lain pada segmen tertentu umat manusia, proyek modernisme juga memakan banyak korban, langsung atau tidak, misalnya, nuklirisme, kerusakan lingkungan, alienasi, kemiskinan massa di belahan dunia yang tertinggal, dan seterusnya. Kaum “fundamentalis sekuler” tidak lagi bisa *jumawab* menawarkan proyek rasionalisme Pencerahan sambil melecehkan kemampuan agama dalam membangun perdamaian dan peradaban dunia. Bahwa sejarah agama mencatat sekian banyak kekerasan dan konflik memang tidak bisa dipungkiri, namun Pencerahan juga menciptakan tragedi kemanusiaan yang tidak kalah mengerikan.

Semua ini hanya menunjukkan pentingnya mereka untuk bersikap lebih rendah diri, bersiap diri mendengar suara lain, termasuk suara agamawan. Mereka harus menyadari bahwa keinginan untuk memperoleh semacam ketenangan batin, rasa aman, dan identitas kelompok, di tengah dunia yang bagi sebagian orang sering tak termaknakan ini, adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka menyatakan bahwa adalah manusia itu sendiri yang berdaulat atas dirinya, bukankah agamawan juga adalah manusia yang patut dihargai kedaulatannya, dengan mendengarkan suara dan aspirasinya. Kesalahan mendasar kalangan “fundamentalisme sekuler” adalah ketika mereka tidak bisa memandang agama kecuali semata-mata penyebab konflik sambil menutup mata atas capaian-capaian negatif atau sisi gelap (*dark side*) dari modernisme yang merupakan anak kandung Pencerahan.

Selain itu, peralatan agama secara fungsional juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan perdamaian. Jika kaum

“fundamentalis sekuler” tidak percaya pada “jalan agama,” bukankah dialog dengan kalangan agamawan--sebagai sesama manusia--tetap saja diperlukan dalam rangka koeksistensi damai. Yang lebih fungsional dari itu juga bisa. Harus diakui bahwa agama memiliki daya rengkuh yang sangat besar. Kekuatan agama ini dapat dimanfaatkan untuk menopang upaya-upaya perdamaian, sekalipun tetap terbuka bagi kaum sekuler untuk skeptis terhadap kebenaran-kebenaran metafisik yang ditawarkan agama.

Akhirnya, di era yang disebut pascamodern ini, siapa pun tidak bisa mengabaikan peran yang disebut kepemimpinan karismatik. Jika seorang pemimpin agama yang karismatik dapat memompa aksi-aksi kekerasan, mengapa kita tidak berusaha untuk mendekatinya dan mengajaknya untuk berperan sebagai *peace builder*? Singkatnya, jika kerja sama dengan agama yang sepenuh, setengah atau bahkan seperempat hati tidak mungkin dilakukan, maka berusahalah untuk tidak menyerang dan melecehkannya.

Yang juga jelas adalah unsur kunci kedua di atas, yaitu persepsi mengenai ketidakadilan yang mendorong aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Justru pada titik inilah kita sering bebal. Kita lupa bahwa dulu Presiden Soekarno pernah menyatakan prinsip yang persis diutarakan oleh Paus Paulus VI: "Saya menginginkan perdamaian, tapi lebih dari itu saya menginginkan keadilan," yang menopang seluruh elemen bangsa ini, lepas dari agamanya apa, untuk bersama-sama melawan kolonialisme.

Dihadapkan pada fakta yang sangat jelas ini, yang pertama-tama harus dilakukan adalah melihat aksi-aksi kekerasan atas nama agama dalam konteks yang lebih luas, untuk menemukan ketidakadilan struktural yang menjadi penyebabnya. Hal ini penting karena tidak satu pun pemahaman dan tindakan yang berada di luar konteksnya. Jika penyebab dari ekstremisme aga adalah struktur sosial-politik yang tidak adil, maka ketidakadilan juga harus menjadi perhatian bagi kelompok yang menginginkan perdamaian.

Panggilan perdamaian oleh agama harus didesain dengan menempatkan ketidakadilan struktural ini sebagai musuh yang harus diperangi dengan segala cara dan dilenyapkan. Jika tidak demikian, maka

agamawan yang anti-kekerasan hanya akan dituduh tidak berbuat apa-apa, kalau bukan malah bersepakat dengan *status quo* ketidakadilan itu. Jika ini yang terjadi, maka seluruh kampanye dan upaya-upaya perdamaian tidak akan mendapatkan simpati masyarakat karena masyarakat akan menganggapnya tidak lebih sebagai tipu muslihat untuk mengekalkan ketidakadilan. Hasilnya adalah simpati masyarakat akan jatuh kepada kelompok yang selama ini menyuarakan kekerasan. Lambat laun, masyarakat akan menganggap bahwa kekerasan sama dan sebangun dengan keadilan.

Ini bukanlah sebuah pekerjaan ringan. Melenyapkan ketidakadilan dengan cara-cara damai adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat. Ia tidak hanya memerlukan keberanian dan pengorbanan, tapi juga keterampilan dan teknik. Pertama kali yang harus ditumbuhkan adalah keyakinan bahwa penyelesaian dengan cara-cara damai terhadap sebuah ketidakadilan struktural adalah cara yang lebih baik, lebih membekas dalam jangka panjang, dan lebih sedikit membawa korban, daripada penyelesaian dengan cara-cara kekerasan. Untuk itu, para agamawan yang anti-kekerasan harus lebih rajin berbagi gagasan dan pengalaman. Mereka juga harus menggalang kerja sama dengan aktor-aktor lain yang sama-sama mendambakan perdamaian.¹²

Studi-studi Perdamaian dan Studi-studi Agama

Setelah menguraikan panjang lebar berbagai potensi yang dimiliki agama dalam menyumbang perdamaian dan berbagai syarat yang diperlukan dalam menciptakan perdamaian, bagian ini akan mengulas tentang peran yang bisa dimainkan oleh departemen studi-studi agama (*department of religious studies*) dalam rangka mendorong dan memperkuat perdamaian. Dalam hal ini, perlu kiranya kita menengok kepada Hans Küng, seorang teolog Katolik terkemuka, “Tidak ada perdamaian di antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama. Tidak

¹² Lihat Mohammed Abu-Nimer, “Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding”, dalam *Journal of Peace Research*, Vol. 38, No. 6 (2001), 685-704; Marc Gopin, *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

ada perdamaian di antara agama-agama tanpa dialog di antara agama-agama. Tidak ada dialog di antara agama-agama tanpa penelaahan terhadap dasar-dasar agama”.

Sejak akhir abad ke-19, studi agama-agama sebagai disiplin khusus telah berkembang pesat dalam arah yang menjadikannya sebagai pemain kunci di dalam upaya memperkuat kesalingpemahaman di antara para pemeluk agama yang berbeda (baik intra-agama maupun antar-agama) dan dialog di antara mereka. Inilah yang secara tersurat diharapkan Hans Küng dalam kutipan di atas.

Pada tahap-tahapnya yang awal, para sarjana Barat, yang mengawali model kesarjanaan ini, sering terjerembap ke dalam tiga arogansi: (1) arogansi ilmiah (Barat adalah satu-satunya tempat di mana akal pikiran dan ilmu pengetahuan bisa berkembang); (2) arogansi monoteis (Kristen Barat adalah satu-satunya agama yang benar, bentuk agama terbaik dan paling sempurna); dan (3) arogansi peradaban (Barat unggul dalam semua bidang peradaban, sehingga yang lainnya harus tunduk dan menirunya). Arogansi ini jelas tercermin dalam kajian-kajian ketimuran atau keislaman yang dilakukan oleh para orientalis awal. Orientalisme sendiri bisa dianggap proyek akademik Barat yang bertujuan untuk menundukkan Timur dengan cara menguasainya, baik secara fisik maupun kesadaran. Tidak heran jika kajian-kajian ketimuran atau keislaman oleh para orientalis awal terhubung sangat kuat dengan upaya kolonisasi maupun misi kristenisasi terhadap Dunia Timur.

Perkembangan studi-studi agama belakangan melangkah menjauh dari arogansi-arogansi ini.¹³ Ini antara lain didorong oleh makin dimanfaatkannya pendekatan fenomenologi di dalam studi-studi agama, yang mendorong agar para peneliti tidak segera melakukan penilaian stereotipikal terhadap agama-agama yang dipelajarinya. Pendekatan fenomenologi berusaha memahami fenomena agama sebagaimana hal itu dipahami oleh para pemeluknya sendiri, dan melihat kesamaan-kesamaan (selain berbagai perbedaan) di antara agama-agama. Semuanya ini juga

¹³ Bagian ini ringkaskan dari Graeme MacQueen, “The Spirit of War and the Spirit of Peace: Understanding the Role of Religion”, dalam Charles Webel and Johan Galtung (eds.), *Handbook of Peace and Conflict Studies* (New York: Routledge, 2007), 331.

didorong oleh keterlibatan sarjana-sarjana Timur sendiri di dalam bidang studi-studi agama ini, baik di negara-negara mereka sendiri maupun di Barat.

Dilihat dari sisi pentingnya dialog di antara berbagai peradaban (yang di dalamnya ada agama) di dunia, sumbangan fenomenologi agama itu mencerminkan langkah maju ke depan. Di berbagai universitas Barat, dengan pendekatan inilah banyak mahasiswa baru diperkenalkan kepada agama-agama non-Barat. Di sini, studi-studi agama, khususnya perbandingan agama-agama (*comparative studies of religions*), dimaksudkan bukan untuk menelanjangi kelemahan agama-agama lain dan menertawainya, melainkan untuk memahaminya seperti yang dipahami para pemeluknya sendiri. Atas dasar pemahaman itu, kemudian digiatkan dialog di antara para pemeluk agama. Dengan begitulah stereotip dan kesalahpahaman mengenai agama-agama tertentu hendak dihindari, jika bukan dihilangkan sama sekali.

Jika di masa-masa awal, kajian keislaman yang dilakukan oleh Barat bertujuan untuk menundukkannya, maka kecenderungan terbaru justru menuju ke arah yang sebaliknya. Memang benar, bahwa banyak kajian keislaman oleh para orientalis awal diabdikan untuk merendahkan dan menjelek-jelekkan Islam karena di masa itu kajian keislaman menjadi bagian dari misi Kristenisasi. Bahkan, perlu diakui juga bahwa sebagian orientalis adalah para misionaris Kristen. Namun, studi-studi agama saat ini melangkah keluar dari semangat parokial menuju sebuah studi yang secara akademik dilakukan untuk mencapai “objektivitas” ilmiah, dan secara etis diabdikan untuk membangun perdamaian melalui kesalingpahaman.

Ketika sempat bersekolah di Amerika Serikat, perkembangan di ataslah yang saya alami sendiri. Karena peristiwa 11 September 2001, sekitar 12 tahun lalu, saya sering diundang oleh para pemeluk agama non-Islam, termasuk fakultas dan program studi tertentu di universitas, bahkan gereja, untuk memberi masukan mengenai agama Islam dan kaum Muslim Indonesia, yang jumlahnya terbesar di dunia. Ini pula yang menjelaskan mengapa buku-buku Islam karangan penulis simpatik seperti Karen Armstrong menjadi buku-buku *best-sellers* di Barat.

Perkembangan di atas tentu harus disambut dengan penuh kegembiraan di negara kita, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan studi-studi agama. Dengan begitu, berbagai perbedaan bukan saja di antara agama-agama, tetapi juga di dalam satu agama yang sama, bisa dipahami dengan baik dan toleransi di antara kelompok-kelompok agama bisa disemai dan diperkukuh.

Penutup

Di tengah situasi di mana agama sering menjadi narasi utama dalam konflik-konflik kemanusiaan, lembaga pendidikan, terutama yang bergerak di bidang studi agama-agama, memiliki peran sentral dalam menciptakan perdamaian. Tentu saja, hal ini hanya mungkin jika studi agama-agama tidak dibebani dengan misi penobatan kepada kelompok lain. Sebaliknya, studi-studi agama justru harus ditempatkan sebagai sebuah kajian akademik, yang tunduk terhadap nalar ilmiah, sambil pada saat yang sama terus-menerus menyuarakan narasi agama yang penuh kasih.

Upaya perdamaian agama memang bukan hal yang mudah. Bukan saja karena media setiap saat menggerojok kita dengan berbagai berita yang melulu tentang konflik dan kekerasan agama, yang itu bisa membangun kesadaran publik tentang kekerasan dan dalam beberapa hal menghambat upaya-upaya perdamaian. Tapi juga, harus diakui bahwa agama juga menyimpan potensi konflik dalam dirinya, di samping tentu saja potensi perdamaian yang menjadi misi setiap agama.

Dalam menghadapi situasi ini, yang bisa kita lakukan adalah menciptakan narasi tandingan yang kuat dan legitimate tentang agama sebagai faktor penting dalam proses *peace building*. Militansi yang dimiliki kelompok ekstremis harus ditandingi dengan militansi perdamaian dengan kadar yang sama, atau bahkan lebih. Akan tetapi, membangun wacana tandingan saja tidak cukup dalam menciptakan sebuah perdamaian. Analisis struktural serta berbagai kemampuan teknis *peace building* juga perlu dimiliki oleh para *peace builders*.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja sama di antara semua elemen, baik antar sesama kelompok agamawan maupun elemen sosial

lain. Bahkan, jika kaum sekuler memandang skeptis terhadap kebenaran yang ditawarkan agama, mereka tetap bisa berpartisipasi di dalamnya atas nama kemanusiaan. Di sinilah nilai strategis program studi agama-agama di perguruan tinggi. Dia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara kelompok agamawan dengan elemen-elemen sosial lain karena wataknya yang agamawi sekaligus akademik.

Daftar Pustaka

- Appelby, Scott. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation*. Boston: Rowan and Littlefield, 1999.
- Esposito, John L. *Islamic Threat: Myth or Reality*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Falk, Richard. *Explorations at the Edge of Time: The Prospects for World Order*. Philadelphia: Temple University Press, 1992.
- Girard, Rene. *Violence and the Sacred*. Terj. Patric Gregory. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1977.
- Gopin, Marc. *Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, Violence, and Peacemaking*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Hadden, Jeffrey K. & Anson Shupe (eds.). *Prophetic Religions and Politics*. New York: Paragon House, 1986.
- Kelsay, John & Summer B Twist (eds.). *Religion and Human Rights*. New York: The Project of Religion and Human Rights, 1994.
- Kelsay, John. *Islam and War: A Study in Comparative Ethics*. Louisville, Kentucky: Westminster, 1993.
- Kertzer, David I. *Ritual, Politics and Power*. New Haven and London: Yale University Press, 1998.
- Little, David (ed.). *Peacemakers in Action: Profiles of Religion in Conflict Resolution*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Lorenz, Konrad. *On Aggression*. Terj. Marjorie Kerr Wilson. New York: Harcourt Brace Javanovich, 1966.

Nimer, Mohammed Abu. "Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding." *Journal of Peace Research*. Vol. 38, No. 6, 2001.

Webel, Charles & John Galtung (eds.). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge, 2007.